

PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP INDIKATOR EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH

Fitriani Purwaningsih^{1*}, Zumaeroh², Sodik Dwi Purnomo³, Bagus Adhitya⁴, Diah Retnowati⁵, Hari Winarto⁶, Heris Kencana⁷

^{1*} FEB Universitas Wijayakusuma Purwokerto, fitrianiipurwaningsih6@gmail.com, Indonesia

² FEB Universitas Wijayakusuma Purwokerto, zumaeroh1234@gmail.com, Indonesia

³ FEB Universitas Wijayakusuma Purwokerto, sodikdwipurnomo@yahoo.com, Indonesia

⁴ FEB Universitas Wijayakusuma Purwokerto, bagus.adhitya26@gmail.com, Indonesia

⁵ FEB Universitas Wijayakusuma Purwokerto, ddyahunwiku@gmail.com, Indonesia

⁶ FEB Universitas Wijayakusuma Purwokerto, hari.unwiku@gmail.com, Indonesia

⁷ FEB Universitas Wijayakusuma Purwokerto, heriskencana@gmail.com, Indonesia

*Corresponding author fitrianiipurwaningsih6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Dana terhadap Kemiskinan, ketimpangan Pendapatan, Infrastruktur Ekonomi, Produktivitas Padi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi sederhana Data Panel. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten di Jawa Tengah. Sample kasus dalam penelitian ini adalah 6 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan Pendapatan. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Infrastruktur Ekonomi. Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap Produktivitas Petani Padi. Implikasi dari penelitian ini yaitu pentingnya efektifitas alokasi dana desa terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Tengah. Pentingnya pembangunan yang inklusif dimana seluruh golongan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama terhadap akses kesejahteraan melalui program – program desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa; Kemiskinan; Ketimpangan Pendapatan; Infrastruktur Ekonomi; Produktivitas Padi.

Abstract

This study to determine the Effect of Fund Allocation on Poverty, Income Inequality, Economic Infrastructure, Rice Productivity in Central Java Province in 2015 – 2020. The type of research used is quantitative research. The research method used is simple regression of panel data. The population in this study were 29 districts in Central Java. The case sample in this study was 6 years. The results of this study indicate that the Village Fund Allocation has a significant negative effect on poverty. Village Fund Allocation has a significant positive effect on income inequality. Village Fund Allocation has a significant positive effect on Economic Infrastructure. Allocation of Village Funds has a significant negative effect on Rice Farmer Productivity. The implication of this research is the importance of the effectiveness of village fund allocation on the welfare development of rural communities in Central Java. The importance of inclusive development where all community groups get equal opportunities to access welfare through village programs.

Keywords: Village Fund Allocation, Poverty, Income Inequality, Economic Infrastructure, Rice Productivity.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan desentralisasi memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengelola keperluan rumah tangganya sendiri terutama dalam kebijakan politik tanpa ikut campur tangan pemerintah pusat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Pembangunan dengan konsep desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah mengali potensi terutama dalam pertumbuhan ekonomi di daerah yurisdiksinya (Bastian, 2015). Kemampuan desa dan tanggung jawab otonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana esensi dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan kewenangan dan kewajiban terhadap pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat daerah tersebut. Kewajiban tersebut tentunya memiliki dampak yang positif maupun negatif terhadap pertumbuhan inklusifitas suatu daerah (harstuti *et al*, 2022).

Salah satu bentuk positif dari otonomi daerah adalah perluasan dan kesesuaian kapasitas masyarakat masing-masing daerah untuk mencapai kesejahteraan melalui sumber daya yang dimiliki (kholmi, 2017). Penguatan bentuk otonomi daerah dalam undang-undang dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan menurut tugas pembantuan dan berasaskan otonomi seluas luasnya Rokhayati *et al*, 2021 Namun demikian dengan adanya struktur otonomi daerah tersebut mewajibkan pemerintah pusat untuk memberikan konsekuensi lebih untuk seperti dana khusus dalam penyelenggaraan otonomi daerah (kholmi, 2017). Konsekuensi tersebut diikuti tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan atau kebijakan fiskal sesuai dengan kepentingan masyarakat (Arfiansyah, 2020). Dalam pengelolaan tersebut dibutuhkan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk memudahkan pekerjaan dibidang fiskal pemerintah daerah sehingga terdapat pembukuan dan penentuan kebijakan yang tepat (Kumalasari & Riharjo, 2016).

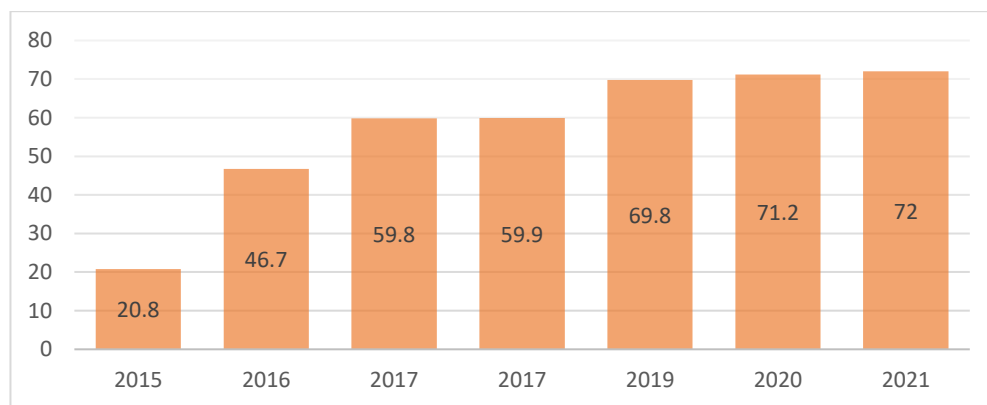
Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah di tingkat Provinsi (Arfiansyah, 2020). Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah secara langsung memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintah mengelola sumber daya dan memastikan masyarakat terlayani dengan baik sesuai pedoman undang-undang (Payana & Suntoro, 2003). Dalam konsep tersebut tentunya dibutuhkan strategi dan program dari kepala daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. (Purnomo *et al* 2021). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 memberikan parameter dalam mencapai kesejahteraan rakyat dengan tiga langkah utama yaitu peningkatan pelayanan terhadap publik, peningkatan pemberdayaan dalam masyarakat, dan upaya mendorong masyarakat dalam daya saing antar daerah (Muntahana *et al*, 2022).

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/kota dengan total desa/kelurahan sejumlah 8,562 dan menjadi provinsi yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak di Indonesia (BPS Provinsi Jawa Tengah 2021). Penduduk di Jawa Tengah mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 5,18 Persen dari tahun (2016 - 2020). BPS Provinsi Jawa Tengah 2021). Jumlah kelurahan/desa serta keselarasan terhadap jumlah penduduk seharusnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi dengan potensi Ekonomi terbesar di Indonesia. Namun demikian menurut Arfiansyah (2020). Menyatakan bahwa Jawa Tengah masih menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Pulau Jawa (11,84 persen).

Indikator ekonomi merupakan parameter yang relevan terhadap tingkat kesejahteraan suatu daerah (Lalira *et al.*, 2018). Angka pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi parameter dalam pemecahan masalah daerah terutama kemiskinan (Arfiansyah, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2020), laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan drastis di tahun 2020 dengan -2,65 lebih rendah dari pertumbuhan nasional dengan 2,07. Penurunan tersebut sangat drastis dan menjadi laju pertumbuhan ekonomi terburuk selama 6 tahun terakhir (2014 – 2020). Pendapatan Domestik Regional Bruto di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 berdasarkan ADHB sebesar -0,95 persen dan berdasarkan ADHK sebesar -2.65 persen (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Ekonomi di desa menjadi salah satu faktor yang terdampak akibat terjadinya perlambatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Lalira *et al.*, 2018). Menurut Sirait & Oktavia (2021); Rokhayati *et al.*, 2021. dana desa di definisikan sebagai dana pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan. Sebagai dasar hukum penetapan dana desa yaitu menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa (2016) di tetapkan bahwa sumber alokasi dana desa diambil dari APBN. Dalam fungsinya, dana desa berfungsi sebagai pendorong bagi masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan, kesetaraan dan kemakmuran (Sirait & Oktavia, 2021).

Secara nasional adanya dana desa dapat mengurangi angka kemiskinan kumulatif, namun belum mampu menyamau tingkat kecepatan penurunan kemiskinan di kota (Sirait & Oktaviani). Dengan jumlah penduduk tinggi yang miskin mayoritas berada di pedesaan, artinya penggunaan dana desa dalam mengurangi angka kemiskinan belum efektif. Karna terdampak nya ekonomi nasional akibat pandemi juga membuat peningkatan alokasi dana desa tidak signifikan di tahun 2020 sebesar 71,2 triliun rupiah atau 2,0 Persen dari tahun 2019 namun pada tahun 2021 melalui RAPBN, dana desa kembali mengalami stagnansi peningkatan nilai sebesar 1,1 persen dibandingkan 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia ,2021). Berikut Grafik Laju Alokasi Dana Desa Dalam Triliun Rupiah Tahun 2015-2020.



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Gambar 1. Laju Alokasi Dana Desa Dalam Triliun Rupiah Tahun 2015 – 2021

Provinsi Jawa Tengah menjadi penerima dana desa terbanyak di Indonesia dengan total dana desa di tahun 2020 mencapai 8,116 triliun lebih besar dari Jawa Timur dan Jawa Barat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Angka tersebut juga lebih besar dari pada dana desa ditahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Sebesar 7,79 triliun atau mendapatkan sebesar 4,18 persen terhadap

7.809 desa di Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2020). Dana tersebut dibagikan ke setiap desa dengan pembangian yang di sesuaikan dengan jumlah jiwa , luas wilayah desa, tingkat penduduk miskin dan bentuk geografis wilayah desa (Yulitasari & Tyas, 2020). Alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah mencapai peningkatan signifikan dari tahun 2015 menuju tahun 2021 dengan tercapinya 199 desa mandiri dan 146 desa tertinggal (Keputusan Direktural Jendral Pembangunan Desa Dan Pedesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021, 2021).

Kebijakan prioritas Jawa Tengah masih difokuskan ke dalam program penanggulangan Penduduk miskin terutama di wilayah pedesaan yang masih menjadi sentra penduduk miskin di Jawa Tengah (Arfiansyah, 2020). (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Upaya dalam penanggulangan kemiskinan mendapatkan tren positif dan terus menurun sejak tahun 2012 hingga 2019 tren positif tersebut lalu berhenti akibat masalah luar biasa yang menyebabkan permasalahan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2021) Presentase penduduk Miskin di Jawa Tengah dari maret 2012 hingga Maret tahun 2021 mengalami tren penurunan sejak september 2020 dengan presentase perubahan 0,05persen. Nirmala *et al*, 2022. Namun tren penurunan tersebut mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2019 dimana rasio peningkatan angka kemiskinan menuju maret 2020 sebesar 0,83persen dan terus naik hingga september 2020. Penelitian yang dilakukan Simarmarta (2016) di desa Hutan Durian Menghasilkan kesimpulan bahwa rasio kenaikan kemiskinan yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan teori *bottle effect* terhadap kemiskinan masyarakat sundari 2021. Pemerintahan desa harus benar-benar mengarahkan pada orang yang tepat sehingga kemiskinan tidak menghasilkan gelombang besar kemiskinan baru akibat tidak efektifnya program dana desa (Achadi *et al*, 2021)

Infrastruktur ekonomi menjadi dimensi dalam mengukur tingkat efektifitas pengelolaan dana desa. Menurut The World Bank Office Jakarta (1966), definisi dari infrastruktur ekonomi adalah bentuk pembangunan fisik yang berfungsi sebagai penyediaan jasa dan produksi meliputi aset publik (air minum, telekomunikasi, gas dan sanitasi), serta sektor pendukung transportasi (jalan, bandara, terminal dan mode transportasi lainnya), infrastruktur dapat membangun pertumbuhan ekonomi daerah. Jawa Tengah menjadi Provinsi keempat terbesar dalam menyumbang perekonomian nasional yaitu 8,54 persen setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah (2020), nilai pertumbuhan dana desa terhadap alokasi terhadap pembangunan mengalami penurunan dari tahun 2019 (9.146.733.358) ke tahun 2020 (8.029.844.725). Pembangunan Infrastruktur ekonomi masih menjadi prioritas di desa – desa Jawa Tengah terutama dalam pembangunan jalan, Infrastruktur pertanian (irigasi) dan perbaikan fisik fasilitas desa (Rahayu, 2018). Pembangunan tersebut guna menunjang aksesibilitas menuju perkotaan sehingga ekonomi desa dapat tumbuh melalui konektivitas antar daerah tersebut (Lai & zhang, 2015).

Pertanian menjadi lapangan usaha mayoritas bagi penduduk Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja di bidang pertanian mencapai 26,28 persen. Pertanian juga menjadi salah satu bidang yang mengalami laju pertumbuhan positif di masa pandemi (tahun 2020) dengan laju pertumbuhan 2,48 persen . Secara menyeluruh produktivitas padi di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,6persen mejadi 56,9 persen. Nilai tukar pertanian Jawa Tengah berada pada kondisi baik dimana pada tahun 2020 berada pada indeks 101,49. Potensi percepatan program kesejahteraan petani di Jawa Tengah menjadi sumber Progresif dalam mendorong Produktivitas padi akibat stagnansi laju pertumbuhan PDRB di bidang pertanian (Sirait & Oktavia, 2021).

Penelitian yang dilakukan sudewi dan wiranti (2013); Rokhayati *et al*, 2022. mengemukakan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kebijakan desentralisasi fiskal akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan potensi dan kreatifitas daerah dan efektifitas dalam mengelola hasil kekayaan daerah yang akan berpengaruh pada penerimaan daerah yang selanjutnya. Berbeda halnya dengan penelitian Syamsul (2020); Rokhayati *et al*, 2021 desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat (winarto *et al* 2022). Begitupula desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Sementara itu, desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Muntahanah *et al*, 2021).

Sari dan Abdullah (2017) mengambil kesimpulan pada penelitiannya bahwa alokasi dana desa terutama pada desa yang tertinggal atau sangat tertinggal akan mendorong keinginan masyarakat untuk melakukan produksi di luar kebiasaannya. (Zumaeroh *et al*, 2022) Dalam penelitian tersebut Alokasi Dana Desa akan menstimulus produksi yang hanya bersifat lokal (antar desa), namun juga membuka kesempatan untuk dapat menyebarkan produksinya menuju perkotaan (Sari dan Abdullah, 2017). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Lalita *et al*, (2018) yang memberi kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan ketimpangan masyarakat desa. (Rokhayati *et al*, 2021).

Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa merupakan salah satu harapan bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan bersaing dengan masyarakat yang ada di perkotaan (Lalira *et al*, 2018). Penelitian yang dilakukan sujaya *et al*, (2018) menyebut bahwa Alokasi Dana Desa dapat mengembangkan potensi produktivitas pertanian terutama dalam upaya mensubsidi alat dan biaya alat dan biaya modal pertanian. Hal tersebut dapat didukung dengan penelitian Yulitasari dan Tyas (2020) yang menyebut bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap produktivitas pertanian dan pembangunan Infrastruktur (Muntahanah, *et al*, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis 1) pengaruh alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 2) pengaruh alokasi dana desa berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. 3) pengaruh alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat pembangunan Infrastruktur ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 4) pengaruh alokasi dana desa berpengaruh terhadap Produktivitas pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Richard & Villancourt (2002) mengemukakan teori desentralisasi fiskal sebagai pendelegasi keuangan pusat kepada daerah dan pengaturan secara mandiri terhadap keuangan secara mandiri disertai tanggung jawab. Dalam teori tersebut Richard dan Villancourt 2002 menyebutkan bahwa terdapat tiga definisi yang pertama desentralisasi fiskal merupakan pemindahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah. Definisi kedua yaitu pemerintahan daerah sebagai representasi pemerintahan pusat melalui proses pendelegasian. Definisi ketiga yaitu pemerintahan daerah

sebagai objek pelimpahan wewenang yang tidak terikat secara penuh, namun memberikan kebebasan dalam memustuskan suatu kebijakan (Purnomo *et al*, 2021)

Davodie & Zou (1998) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai perubahan pola keuangan yang terpusat. Penelitian yang dilakukan Davodie dan Zou (1998) menggunakan analisis terhadap faktor pertumbuhan internal terhadap negara – negara di dunia sejak tahun 1970 hingga 1989 menunjukkan bahwa dari 46 negara, mayoritas negara maju atau negara dengan GDP tinggi memiliki kebijakan desentralisasi fiskal dari pada negara berkembang. Negara maju dalam observasi penelitian tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal guna meningkatkan produksi negara. Kebijakan desentralisasi fiskal akan lebih efisien jika hanya kepentingan fiskal namun juga pemerintah Purnomo & Danuta 2022.

Thornton (2007) melakukan penelitian terhadap kebijakan desentralisasi fiskal dengan menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi yaitu dengan memberikan dana mentah kepada daerah untuk dikelola dengan motivasi tertentu. Hasil dari penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi mikro daerahnya namun dampak yang ditimbulkan adalah penambahan pendapatan. Pendapatan akan muncul karena dana yang dikelola merubah bahan produksi mentah menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi mikro daerah akan muncul jika wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya yang baik (Murdijaningsih *et al*, 2021).

Indonesia telah melakukan desentralisasi fiskal sejak munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kusuma (2013); Winarto *et al*, 2021 mengemukakan teori desentralisasi fiskal sebagai alat yang digunakan pemerintah pusat untuk membangun ekonomi daerah dalam mencapai kesetaraan pembangunan. Peneliti yang dilakukan Kusuma (2013) tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah melalui sistem Belanja Daerah menstimulus pembangunan ekonomi daerah dalam menifestasi terhadap pendapatan asli daerah (Muntahanah *et al*, 2022).

2.2 Dana Desa dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Bawono (2019). Memberikan definisi desa sebagai bentuk pemerintah paling kecil dari sistem desentralisasi. Desa di Indonesia mayoritas memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tujuan sari adanya pemerintah desa tentunya tidak lepas dari proses pembangunan nasional maupun daerah yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Surveyardini (2021).

Aturan yang mendasari Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan Alokasi Dana Desa diurutkan melalui kepentingan dalam pasal 20,24,38, dan 44.

- Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - 1) Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa
 - 2) Sekretaris Desa menyampaikan rencana peraturan Desa tentang APBDesa Kepada kepala Desa.
 - 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan di sepakati bersama.

- 4) Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa di sepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan petanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
 - 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - Pengawasan Alokasi Dana Desa
 - 1) Pemerintahan Provinsi Wajib membina dan mengawasi pemebrian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil pajak dan Restribusi Daerah dari kabupaten/kota kepada Desa.
 - 2) Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam mencapai pengelolaan dana desa yang baik, Pemerintah desa harus memiliki perencanaan terhadap alokasi dana desa, implementasi terhadap perencanaan dana desa, pertanggung jawaban atas pengguna dana desa, dan pengawasan terhadap seluruh proses pergerakan dana desa . perencanaan alokasi dana desa yang baik juga harus memiliki keterkaitan dengan APBDesa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alokasi Dana Desa direncanakan sesuai APBDesa dan pengusulan dan penentuannya dilakukan melalui musyawara desa atau disebut dengan istilah Musrenbangde (Musyawara Perencanaan Desa). Sehingga dalam implementasi dilapangan sesuai dengan nilai, ide dan tujuan masyarakat desa tersebut.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah penelitian ini dilakukan di 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Data di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2015- 2020 berupa data Alokasi Dana Desa, Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Infrastruktur Ekonomi dan Produktivitas Petani Padi. Adapaun definisi dari variabel penelitoian ini adalah 1) Alokasi Dana Desa adalah jumlah dan dana desa yang dimiliki oleh suatu desa. Dana desa diukur dalam satuan juta rupiah. 2) kemiskinan adalah jumlah orang yang mengalami kemiskinan dalam suatu daerah. Diukur dalam satuan persen, 3) Ketimpangan adalah jumlah presentase jumlah perbedaan pendapatan pada suatu daerah yang diukur dalam satuan persen 4) Indek Desa Membangun merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk kepentingan tertentu, Indek Desa Membangun diukur dalam jumlah

pembangunan infrastruktur pada suatu desa dengan satuan unit, 5) Produktivitas Petani Padi merupakan hasil produksi padi dalam kurun waktu tertentu yang diukur dalam satuan (ton/ha).

Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kemiskinan, ketimpangan pendapatan, infrastruktur ekonomi dan produktivitas petani padi di Provinsi Jawa Tengah menggunakan analisis regresi sederhana dengan data panel. Data panel merupakan data kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Di dalam penelitian ini menggabungkan data dari Provinsi Jawa Tengah sebagai data *cross section* menggunakan periode 2015 – 2020 sebagai data *time series*. Dengan model persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persamaan 1 : } & 1Y_{1it} = \beta_0 + X_{1it} + \varepsilon_{1it} \\ \text{Persamaan 2 : } & Y_{2it} = \beta_0 + X_{1it} + \varepsilon_{2it} \\ \text{Persamaan 3 : } & Y_{3it} = \beta_0 + X_{1it} + \varepsilon_{3it} \\ \text{Persamaan 4 : } & Y_{4it} = \beta_0 + X_{1it} + \varepsilon_{4it} \end{aligned}$$

Dengan keterangan

Y ₁	= Kemiskinan
Y ₂	= Ketimpangan Pendapatan
Y ₃	= Infrastruktur Ekonomi
Y ₄	= Produktivitas Pertanian
X ₁	= Alokasi Dana Desa
B ₀ , β ₁ , ... β ₄	= Koefisien Variabel Bebas
i	= <i>cross section</i>
t	= <i>Time Series</i>
ε ₁ , ε ₂ , ..., ε ₄	= Random Error

4. Hasil

4.1 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan

Dalam melakukan estimasi data menggunakan metode data panel digunakan tiga alternatif model yang selanjutnya akan ditentukan model yang terbaik. Hasil Uji *Chow* menunjukkan terdapat signifikansi data yaitu dengan nilai *Cross Section Chi Square* sebesar 0,0000. Dari data tersebut model yang sesuai diantara *Common effect Model* dengan *Fixed Effect Model* adalah *Fixed Effect Model*. Hasil Analisis Uji Hausman menunjukkan bahwa terdapat signifikansi uji *Cross Section* random pada nilai *Porbabilitas* 0,0003. Nilai uji tersebut < 0,05 dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang sesuai dengan penelitian. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-13,9464 < -1,6539$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) Artinya bahwa Alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dalam melakukan Estimasi data menggunakan metode data panel digunakan tiga alternatif model yang selanjutnya akan ditentukan model yang terbaik. Hasil analisis Uji *Chow* menunjukkan bahwa terdapat signifikansi data yaitu dengan nilai *Cross-section chi-square* sebesar 0,0000 dari data tersebut model yang sesuai diantara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* adalah *Fixed Effect Model*. Hasil analisis uji Hausman menunjukkan bahwa terdapat signifikansi uji *Cross-section* random pada nilai *Porbabilitas* 0,0025. Nilai uji tersebut < 0,05 dengan hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang sesuai dalam penelitian. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($18,7864 > 1,6539$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) Artinya bahwa Alokasi dana desa berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.3 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Infrastruktur Ekonomi

Dalam melakukan estimasi data menggunakan metode data panel digunakan tiga alternatif model yang selanjutnya akan ditentukan model yang terbaik. Hasil analisis Uji Chow menunjukkan bahwa terdapat signifikansi data yaitu dengan nilai *cross-section chi-square* sebesar 0,0000. Dari data tersebut model yang sesuai diantara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* adalah *Fixed Effect Model*. Hasil analisis Uji Hausman menunjukkan bahwa terdapat signifikansi uji *cross-section random* pada nilai *Probabilitas* 0,0000. Nilai uji tersebut $< 0,05$ dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model yang sesuai dengan penelitian. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($12,8395 > 1,6539$) dan probabilitas 0,0000. Artinya bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap Infrastruktur Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

4.4 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Produktivitas Petani Padi.

Dalam melakukan estimasi data menggunakan metode data panel digunakan tiga alternatif model yang selanjutnya akan ditentukan model yang terbaik. Hasil analisis Uji Chow menunjukkan bahwa terdapat signifikansi data yaitu dengan nilai *cross-section Chi-square* sebesar 0,0000. Dari data tersebut model yang sesuai diantara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* adalah *Fixed Effect Model*. Hasil analisis Uji Hausman menunjukkan bahwa terdapat signifikansi uji *Cross-section random* pada nilai Probabilitas 0,6197. Nilai uji tersebut $> 0,05$ dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan model yang sesuai dalam penelitian. Uji *Lagrange Multiplier* merupakan pengujian untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Parameter uji pada uji ini yaitu jika nilai signifikansi Breusch-Pagan kurang dari 0,05 ($< 0,05$) maka REM merupakan model yang sesuai sedangkan jika lebih maka CEM merupakan model yang sesuai. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-5,2640 < -1,65392$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) . Artinya bahwa Pengelolaan Alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap produktivitas petani padi di Provinsi Jawa Tengah.

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan

Hasil analisis variabel independen kemiskinan terhadap variabel dependen Alokasi Dana Desa ditunjukkan melalui uji t. Pada *model Fixed Effect* sebagai model yang paling sesuai menunjukkan nilai t-Statistic sebesar -13,9464 dan *probabilitas* 0,0000 yang menandakan bahwa variabel alokasi dana desa memiliki signifikansi korelasi terhadap kemiskinan. Hasil uji deskriptif terhadap tingkat Alokasi Dana Desa yang terus meningkat di setiap kabupaten setiap tahun diikuti oleh tingkat kemiskinan yang menurun sebelum tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin di desa tertinggal. Program unggulan seperti

Program Satu Organisasi Perangkat Daerah dilakukan melalui pembiayaan dana desa (Yulitasari & Tyas, 2020).

Temuan Lalita et al 2018 bahwa variabel Alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan artinya Alokasi Dana Desa yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam mengurangi kemiskinan, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, adanya dana desa yang meingkat setiap tahunnya seharusnya tingkat kemiskinan juga akan berkurang. Sebab Dana Desa tersebut dapat menciptakan tenaga kerja, memberikan peluang kerja yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan pembangunan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa Nugraha & Danuta 2021.

Temuan Sigit & Kosasih (2020) dan Dwi & Irama (2018) bahwa variabel Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin hal tersebut menunjukkan bahwa ketika alokasi dana desa naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun berbeda dengan penelitian Azwardi & Sukanto (2014); Rokhayati *et al*, 2021. yang juga menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. bahwa Alokasi Dana Desa memiliki kaitan dengan belanja daerah untuk perkembangan desa. Bahkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada umumnya alokasi dana desa menjadi sumber utama pemerintah desa untuk menanggulangi tingkat kemiskinan. Hasil simulasi kebijakan yang dilakukan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa mampu meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah, yaitu antara lain mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolok ukur kemandirian daerah. Peningkatan penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa juga mampu meningkatkan total pengeluaran daerah untuk mendorong peningkatan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) daerah (winarto *et al* , 2022). Selanjutnya peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di perdesaan Danuta & Nugraha 2021.

Dari hasil pembahasan mengenai hubungan antara dana desa dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi alokasi dana desa akan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, adanya dana desa yang meingkat setiap tahunnya seharusnya tingkat kemiskinan juga akan berkurang. Sebab Dana Desa tersebut dapat menciptakan tenaga kerja, memberikan peluang kerja yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan pembangunan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. melalui program – program penuntasan kemiskinan seperti pemberdayaan perangkat desa, produksi UMKM desa, dan program bantuan terhadap kebutuhan pokok masyarakat miskin Lalira *et al.*, (2018). Temuan Rimawan dan Aryani (2019) mengemukakan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan hal ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa belum mampu mengurangi kemiskinan dikarenakan program yang dilakukan oleh pemerintah desa masih mengedepankan pembangunan Infrastruktur tidak memperbanyak program mengenai pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Purnomo & Danuta 2022.

5.2 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan

Hasil analisis variabel independen ketimpangan terhadap variabel dependen Alokasi Dana Desa ditunjukkan melalui uji t secara parsial. Pada *model Fixed Effect* sebagai model yang paling sesuai menunjukkan nilai t-Statistic sebesar 18.78642 dan *probabilitas* 0.0000 menandakan bahwa variabel ketimpangan memiliki signifikansi terhadap alokasi dana desa. Nilai positif pada t-hitung

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai alokasi dana desa, maka tingkat ketimpangan semakin besar.

Indeks Gini atau gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh (Bank Indonesia, 2021). Hasil penelitian yang menunjukkan signifikansi positif berbeda dengan penelitian yang dilakukan Imawan & Purwanto (2020), Mubazaroh & Hasmarini (2020) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan atau indeks gini rasio Adhitya 2021. Perbedaan pada hasil penelitian ditunjukkan dalam nilai deskriptif gini rasio seluruh 29 kabupaten di Jawa Tengah yang berfluktuatif sejak tahun 2015 – 2020. Indeks gini di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa tiap kabupaten memiliki fluktuasi gini ratio di tahun 2015 hingga 2020. Secara mayoritas kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan indeks gini di tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 kemudian beranjak naik hingga 2020 (BPS, 2020). Hal tersebut dapat terjadi karena di tahun 2017 Jawa Tengah mengalami perubahan politik dan gubernur sehingga mengalami perubahan siklus produksi dan pelayanan jasa (BPS, 2020). Tahun 2019 hingga 2020 pandemi Covid-19 menjadi wabah dan konsentrasi seluruh dunia yang menyebabkan proses produksi dan pelayanan mayoritas berhenti. Hal tersebut dapat dirasakan golongan pendapatan kelas IV atau terbawah yang mengalami kekosongan pendapatan sehingga tingkat ketimpangan meningkat (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Dampak perubahan produksi di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diantaranya disebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja di banyak perusahaan yang menyebabkan hilangnya pendapatan mayoritas masyarakat Jawa Tengah (BPS, 2020). Fenomena PHK pada secara massal merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pada suatu wilayah (Hendrastomo, 2010); Adhitya et al, 2022. Dari hasil pembahasan mengenai dampak alokasi dana desa terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data panel menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi dana desa maka semakin tinggi nilai ketimpangan pendapatan. Purnomo 2021. Hal tersebut merupakan penemuan baru dimana dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat faktor yang menghambat penurunan tingkat ketimpangan pendapatan akibat penurunan jumlah produksi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 Hal tersebut membuat pemutusan hubungan kerja massal yang mempengaruhi pendapatan penduduk Provinsi Jawa Tengah Surveyandini & Achadi 2021.

5.3 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Infrastruktur Ekonomi

Hasil analisis variabel independen infrastruktur ekonomi terhadap variabel dependen Alokasi Dana Desa ditunjukkan melalui uji t secara parsial. Pada *model Fixed Effect* sebagai model yang paling sesuai menunjukkan nilai *t-Statistic* sebesar 12.83951 dan *probabilitas* 0.0000 menandakan bahwa variabel infrastruktur ekonomi signifikan terhadap alokasi dana desa. Nilai positif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai alokasi dana desa, maka tingkat infrastruktur ekonomi semakin besar. Nilai indeks infrastruktur ekonomi diperoleh dari nilai Indeks Ketahanan Ekonomi yang diukur melalui dimensi Keragaman Produksi Masyarakat akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, keterbukaan wilayah (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2021). Nilai pembangunan infrastruktur ekonomi desa melalui alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2015 – 2020 pada setiap kabupaten yang ada di Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Semakin tinggi alokasi dana, desentralisasi wilayah (dana desa) terhadap akses maupun infrastruktur berkorelasi positif dengan

tingginya dana yang dibutuhkan (Lai & Zhang, 2015). Penelitian Lai & Zhang (2015), Sutriani & Damanik (2022) menunjukkan bahwa tingkat alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap infrastruktur ekonomi.

Temuan Arina *et al.* (2021) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya setiap adanya peningkatan Alokasi Dana Desa maka akan meningkatnya Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rimawan (2019) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Winarto *et al.*, 2022). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap indeks desa membangun. Alokasi dana desa terhadap infrastruktur ekonomi sangat dipengaruhi dengan kebijakan fiskal suatu negara (Mubazaroh & Hasmarini, 2020). Peningkatan infrastruktur ekonomi dinilai menjadi aspek bisnis yang menjanjikan khususnya pada daerah berkembang seperti Jawa Tengah karena sumber daya desa yang sangat potensial (Arfiansyah, 2020). Peningkatan akses seperti jalan dan jembatan sangat membantu dalam distribusi produksi UMKM desa di Jawa Tengah mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi yang luas dan akses desa – kota yang belum seluruhnya terkoneksi (Arfiansyah, 2020).

Berdasarkan penelitian Gani *et al.* (2020) bahwa penggunaan dana desa di desa - desa tertinggal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa berkontribusi positif terhadap ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi serta status desanya meningkat menjadi desa berkembang dan maju. Dari pembahasan mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap infrastruktur ekonomi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan semakin tinggi alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah maka semakin tinggi infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi yang difokuskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan fasilitas pertanian seperti irigasi dan drainase serta akses transportasi seperti jalan dan jembatan (Harstuti *et al.*, 2022).

5.4 Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Produktivitas Petani Padi

Hasil analisis variabel independen produktivitas petani padi terhadap variabel dependen Alokasi Dana Desa ditunjukkan melalui uji t secara parsial. Pada *model fixed Effect* sebagai model yang paling sesuai menunjukkan nilai t-Statistic sebesar -5.264038 dan *probabilitas* 0.0000 menandakan bahwa variabel alokasi dana desa memiliki korelasi signifikan negatif terhadap produktivitas petani padi. Hasil nilai uji t-statistic yang bernilai negatif sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Herdiansah, Sujaya *et al.*, (2018) yang mengemukakan bahwa tingkat alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap produktivitas petani padi. Penelitian yang dilakukan Yulitasari & Tyas (2020) mengemukakan bahwa tingkat produktivitas padi akan meningkat jika petani dapat mudah mendapatkan alat dan bahan dalam bertani.

Nilai fluktuatif pada produktivitas petani padi di Jawa Tengah disebabkan berubahnya taraf penjangkauan petani terhadap kebutuhan pertanian (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Pada tahun 2019 – 2020 produktivitas petani menurun karena pendapatan rendah sedangkan harga bahan pertanian tinggi (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Alokasi dana desa yang diberikan pemerintah belum mampu menutupi seluruh subsidi

sektor pertanian Kabupaten di Jawa Tengah. Studi empiris Purbasari et al (2018) menyatakan alokasi dana desa tidak dapat berpengaruh terhadap produktivita petani. Hal ini dikarenakan Alokasi dana desa di kabupaten sukoharjo lebih banyak di alokasikan untuk penghasilan tetap desa sehingga cukup beralasan jika alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas padi. Surveyandini 2022.

Pemerintah Jawa Tengah melalui subsidi sektor pertanian berfokus pada pemberian bantuan bahan dasar pertanian seperti benih, pupuk, pembasmi hama maupun alat – alat pertanian (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Namun demikian, jumlah lahan padi yang terlalu besar dibandingkan dana desa yang dialokasikan belum mampu memberikan pemerataan pada seluruh petani (Herdiansah Sujaya *et al.*, 2021). Dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi produksi dan stok barang pertanian membuat harga melambung tinggi dan sulitnya petani dalam mengakses fasilitas pemberdayaan pertanian membuat kondisi produksi padi menjadi terhambat. Dari pembahasan mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap produktivitas petani padi menunjukkan bahwa alokasi dana desa ber-pengaruh negatif terhadap produktivitas petani padi di Provinsi Jawa Tengah. Alokasi dana desa yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan produktivitas petani padi masih belum mampu menunjang seluruh aktivitas produksi ditambah dengan kondisi pandemi dan anomali cuaca yang membuat produksi padi menjadi sangat sulit.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 1) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 2) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah. 3) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat infrastruktur ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 4) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap produktivitas petani padi di Provinsi Jawa Tengah.

Implikasi dari penelitian ini yaitu pentingnya efektifitas alokasi dana desa terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Tengah. Pentingnya pembangunan yang inklusif dimana seluruh golongan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama terhadap akses kesejahteraan melalui program - program desa. Tingkat kemiskinan dapat menjadi tolok ukur penurunan tingkat ketimpangan pendapatan pada seluruh golongan masyarakat. Pentingnya program alokasi dana desa yang efektif dapat memberdayakan masyarakat secara mandiri melalui pengembangan sumber daya yang ada di sekitar desa. Pentingnya pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengkolaborasikan program prioritas seperti subsidi UMKM dan petani padi dapat menjadi solusi dalam membangun masyarakat yang madani pa-da seluruh desa di Provinsi Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(c), 91–106.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41

- Azwardi, A., & Sukanto, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (Journal Of Economics And Development)*, 12(1), 29-41.
- Achadi, A., Surveyandini, M., & Prabawa, A. (2021). Pengaruh Kualitas Website E-Commerce, Kepercayaan, Persepsi Risiko dan Norma Subyektif terhadap Minat Beli Secara Online di bukalapak. com. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1207-1212.
- Adhitya, B. (2021). Analisis Determinan Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 184-187
- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288-295
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga.
- Bawono, I. R. (2019). *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- BPS. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa*. 619.
- BPS. (2020). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah Maret 2020*. September, 16–19.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Indeks Kedalaman Kemiskinan 2016-2021*. Badan Pusat Statistik.
- Davoodi, H., & Zou, H. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth : A Cross-Country Study. 244–257.
- Danuta, K. S., & Nugraha, G. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 96-99.
- Dessriadi, G. A., Harsuti, H., Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2022). Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 195-198.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021, (2021).
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaaan. (2021). *Manual Book Idm 2021*.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 11-18
- Hendrastomo, G. (2010). Menakar kesejahteraan buruh: memperjuangkan kesejahteraan buruh diantara kepentingan negara dan korporasi. *Jurnal Informasi*, 16(2), 1-16.

- Harsuti, H., Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2022). Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 195-198.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Kebijakan Dana Desa 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021, (2021).
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143-182.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 5(November).
- Kusuma, H. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 1–11.
- Lai, Y., & Zhang, X. (2016). Redevelopment of industrial sites in the Chinese ‘villages in the city’: An empirical study of Shenzhen. *Journal of cleaner production*, 134, 70-77
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. 18(04), 62–72.
- Mubazaroh, R., & Hasmarini, I. M. I. (2020). Analisis Pengaruh Penetapan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2015-2017. <http://eprints.ums.ac.id/86940/>
- Muntahanah, S., Cahyo, H., Sundari, S., Surveyandini, M., Danuta, K. S., & Murdijaningsih, T. (2022). Analisis struktur modal pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2020. *Akuntabel*, 19(2), 275-283.
- Muntahanah, S., Huda, N. N., & Wahyuningsih, E. S. (2021). Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(2), 311-314.
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2020). Peran Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 234-243.
- Muntahanah, S., Huda, N. N., & Wahyuningsih, E. S. (2021). Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(2), 311-314.
- Muntahanah, S., Cahyo, H., Sundari, S., Surveyandini, M., Danuta, K. S., & Murdijaningsih, T. (2022). Analisis struktur modal pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2020. *AKUNTABEL*, 19(2), 275-283.

- Murdijaningsih, T., & Muntahanah, S. (2021). Audit Delay Analysis to Support the Effectiveness of Company’s Financial Reporting on Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(1), 160-163
- Nirmala, N., Muntahanah, S., & Achadi, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Feb Universitas Wijayakusuma Purwokerto. *Monex: Journal Of Accounting Research*, 11(01), 1-9.
- Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222-1227.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun Tentang Pemerintah Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022, April). Studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia. In *Forum Ekonomi* (Vol. 24, No. 2, pp. 288-298) Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 97 (2014).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 45 (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Purbasari, H., Wardana, B. W., & Pangestu, I. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Proceeding of The URECOL*, 281-288
- Purnomo, S. D., Cahyo, H., & Mukharomah, S. A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung di Bank Syariah pada Masyarakat Kabupaten Banyumas. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(2), 343-350.
- Purnomo, S. D., Adhitya, B., & Zumaeroh, Z. (2021). Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Industri Mikro dan Kecil di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(1), 85-95.
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215-220.
- Purnomo, S. D. (2021). Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 240-24
- Richard, B. M., & Villancourt, F. (2002). *Desentralisasi Fiskal negara-negara Berkembang* (P. G. Pustaka (ed.)). PT Gramedia Pustaka.

- Rokhayati, I., Purnomo, S. D., Retnowati, D., Winarto, H., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analysis of financial distress in banking companies listed on the Indonesian stock exchange. *AKUNTABEL*, 19(2), 269-274
- Rokhayati, I., Harsuti, H., & Lestari, D. P. (2021). Analisis Karakteristik Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 51-57
- Rokhayati, I., Nirmala, N., & Oktaviani, W. T. (2021). Capital Structure Conditions Affected by Company Internal Factors: a Case Study of Non-Cyclicals Consumer Companies on Indonesian Stock Exchange. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(2), 351-356.
- Rokhayati, I., Wahyuningsih, E. S., & Kurniawan, S. A. (2021). Bagaimana Mengukur Nilai Perusahaan Dari Faktor Internal Perusahaan? Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Di Bei. *Monex: Journal Of Accounting Research*, 10(2), 174-183.
- Rokhayati, I., Purnomo, S. D., Retnowati, D., Winarto, H., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analysis of financial distress in banking companies listed on the Indonesian stock exchange. *AKUNTABEL*, 19(2), 269-274.
- Rokhayati, I., Lestari, H. D., Harsuti, H., & Rosadi, W. (2021). Why Stock Returns on Property and Real Estate Companies on BEI?. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1228-1231.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung.
- Syamsul, S., & Zuhroh, S. (2021). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1-10
- Sundari, S., & Urip, C. R. (2021). Kapabilitas Membangun Jaringan dengan Pemasok untuk Meningkatkan Kinerja Operasional Pada Toko Aksesoris Telepon Genggam Di Kabupaten Banyumas. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 84-95.
- Sirait, R. A., & Oktavia, E. (2021). Tinjauan singkat dana desa tahun 2015-2020. *Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020*, 1–5.
- Simarmata, A. C. 2016 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hutan Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten serdang, *Jurnal Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas, Medan Area*
- Surveyandini, M., & Achadi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kinerja Karyawan Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan American English Course Purwokerto. *Sebatik*, 25(1), 241-247.
- Sujaya, D. H., Hardiyanto, T., & Isyanto, A. Y. (2018). Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas usahatani mina padi di Kota Tasikmalaya. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4(1), 25-39.
- Surveyandini, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impulse Buying Pada Konsumen Karita Muslim Square Purwokerto. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 277-281

- Surveyandini, M. (2022). The Results of the SWOT Analysis Approach in Formulating Company Strategy at the American English Course Purwokerto. *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, 13(1), 7-14.
- Sutriani, & Damanik, D. (2022). Analisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kota pematangsiantar.
- Thornton, J. (2007). Fiscal decentralization and economic growth reconsidered. *Journal of urban Economic*, 61, 64-70
- The World Bank Office Jakarta. (1966). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *The World Bank*, 112(483), 211–212.
- Winarto, H., Zumaeroh, Z., & Retnowati, D. (2022). Pengaruh Human Capital, Upah Minimum dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 190-194
- Winarto, H., Poernomo, A., & Prabawa, A. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(1), 34-42
- Winarto, H., Zumaeroh, Z., & Retnowati, D. (2022). Pengaruh Human Capital, Upah Minimum dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 190-194.
- Winarto, H., Poernomo, A., & Prabawa, A. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(1), 34-42.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 4(2), 74-83